



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW SOLO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWIYANTO CAHYO SUMIRAT
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 244061

II. DATA HARTA

- A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.650.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000
 2. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 459.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
 2. MOTOR, HONDA VARIO 150CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
 3. MOBIL, TOYOTA YARIS S A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
 4. LAINNYA, POLYGON XTRADA 6 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
 5. MOBIL, MERCEDES BENZ C300 W204 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
 6. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 MOTOR BEBEK Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 16.000.000
- D. SURAT BERHARGA** Rp. ---
- E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 157.324.800



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.282.324.800
III. HUTANG	Rp.	2.428.736.501
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.853.588.299

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.